



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KONSTANTIN SIBORO
2. Jabatan : DIREKTUR PENINGKATAN KINERJA DAN MANAJEMEN RESIKO
3. NHK : 54088

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 520.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 231.063.852

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.386.063.852

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.386.063.852

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.